



Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang memiliki keanekaragaman dari segi, suku, agama, bahasa dan adat istiadat, bahkan sumber kekayaan alam yang dimilikipun sangat beragam. Keanekaragaman tersebut, jika tidak dikelola dengan baik secara adil dan merata, akan dapat menjadi potensi konflik, sehingga mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.

Gerakan-gerakan radikal yang berupaya untuk mengadakan perubahan secara cepat, menyeluruh dan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara telah tumbuh dengan ciri-ciri tanpa mengindahkan ketentuan dan konstitusi yang berlaku, tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, tidak toleran, merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Kondisi ini akan melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, sehingga ingin memaksakan orang lain atau kelompok lain berperilaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan.

Radikalisme telah mengakar lama di dalam masyarakat Indonesia, bahkan pada perjalanan bangsa Indonesia sejak masa kemerdekaan, seperti peristiwa Madiun/PKI (1948), DI /TII (1949), G 30 S/

PKI (1965) dan konflik-konflik internal lainnya dalam skala lebih kecil. Timbul tenggelamnya gerakan radikal sejak lama sampai saat ini dapat dianggap sebagai fenomena bahwa radikalisme sebagai “musuh kontemporer” sekaligus sebagai “musuh abadi”.

Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara terhadap gerakan radikal menjadi sangat penting. Berbagai upaya pemerintah dalam penanggulangan aksi radikalisme melalui instrumen regulasi telah banyak dilakukan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan beberapa kebijakan lainnya yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda serta melibatkan pemerintah daerah. Namun kenyataannya sampai saat ini aksi-aksi radikal masih merupakan ancaman serius dan potensial. Belakangan munculnya pergerakan kelompok radikal *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di Irak dan Syria yang sudah banyak tersebar di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia.

2. Pokok- Pokok Persoalan

Hasil Kajian Berlanjut yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) dari sudut pandang pancagatra, merumuskan bahwa pokok persoalan terkait dengan penanggulangan radikalisme adalah:

a. Aspek Ideologi. Berkembangnya paham-paham radikal yang menawarkan dan memperjuangkan pemikiran yang tidak sejalan dengan

ideologi Pancasila yang bersifat plural, toleran dikarenakan longgarnya implementasi ideologi Pancasila kepada masyarakat Indonesia. Reformasi telah membuka kesempatan bagi segenap rakyat Indonesia untuk membawa ideologi, termasuk paham-paham radikal kedalam kehidupan masyarakat Indonesia.

- b. Aspek Politik. Kurang berperannya partai sebagai lembaga politik dalam mendidik kader-kader partai untuk bersikap, berpikir dan berperilaku sebagai politisi yang memiliki wawasan kebangsaan dan mengutamakan kepentingan nasional.
- c. Aspek Ekonomi. Banyaknya pengangguran dan tidak meratanya pendapatan masyarakat antara kelas atas dan kelas bawah serta ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah memberikan kerentanan tersendiri yang menyebabkan semakin mudahnya paham-paham radikal dapat berperan sebagai alternatif solusi bagi orang-orang yang kurang sejahtera.
- d. Aspek Sosial Budaya. Kebijakan bidang pendidikan (formal, non formal, informal) yang belum mampu secara maksimal menghasilkan sumberdaya manusia yang berkarakter kebangsaan, pluralis/multikultur, toleran dan berkebudayaan Indonesia.
- e. Aspek Pertahanan dan Keamanan. Dibuatnya berbagai macam regulasi di sektor pertahanan dan keamanan memerlukan penyesuaian-penyesuaian institusional di berbagai bidang. Lemahnya koordinasi antar institusi yang berperan pada aspek pertahanan dan keamanan serta dengan dicabutnya Undang-Undang No. 11/

PnPs/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi membuat pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan radikal menjadi lebih sulit.

3. Data dan Fakta

a. Data

1) Perkembangan Gerakan Radikalisme di Indonesia

Perkembangan radikalisme di Indonesia telah melahirkan tindakan kekerasan dan aksi terorisme. Aksi terorisme di Indonesia mulai meningkat intensif sejak tahun 2000 yang ditandai dengan sejumlah kasus peledakan bom, antara lain: bom terhadap dubes Philipina dan peledakan di malam natal tahun 2000 terhadap 30 gereja di 22 kota di Indonesia.¹ Perkembangan mutakhir, ada sejumlah peristiwa terorisme atau rencana aksi teror yang dilakukan oleh kelompok yang tidak terkait langsung dengan struktur organisasi di atas atau hanya memiliki hubungan fisik, namun mereka melakukan kajian-kajian keagamaan sendiri, berlatih kemampuan militer termasuk bom bunuh diri dan merencanakan serta melaksanakan aksi teror secara perorangan. Sejak tahun 2000 sudah hampir 1.000 orang anggota jaringan radikal telah ditangkap dan sekitar 800 orang lebih diproses hukum.²

2) Ancaman Radikalisme di Indonesia

Berdasarkan data yang disampaikan Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional Irjen Pol. Drs. Bambang Suparno, SH.,M.Hum terkait perkembangan-perkembangan aksi radikalisme sebagai berikut³:

a) Tahun 2012 terjadi rangkaian aksi radikal/teroris sebagai berikut :

- (1) Kelompok radikal/teroris (5 orang) di Bali, bulan Maret 2012.
 - (2) Kelompok radikal/teroris (*financing terrorism*) tertangkap di Jakarta-Medan-Palembang-Bandung-Solo-Jawa Timur, bulan Mei 2012.
 - (3) Kelompok radikal/teroris (2 orang) di Poso, bulan Juli 2012.
 - (4) Kelompok radikal/teroris Farhan cs di Solo, bulan Agustus dan September 2012.
 - (5) Kelompok Baderi (11 orang) di Solo, bulan September 2012.
 - (6) Kelompok Walid (5 orang) di Ambon, bulan September 2012.
 - (7) Rangkaian aksi radikal/teroris di Poso, bulan Desember 2012.
 - (8) Kelompok radikal/teroris di Makassar, bulan Desember/ Januari 2012.
 - (9) Kelompok radikal/teroris Bima, bulan Januari 2013.
- b) Pada tahun 2013 dan 2014 akan keluar dari penjara ± 300 napi teroris.
- c) Tahun 2012 telah muncul sel-sel baru teroris, seperti :
- (1) HASMI (Halakah Sunni untuk masyarakat Indonesia), merencanakan untuk mem-bom Kedutaan Besar Amerika Serikat.
 - (2) JMIT (Jaringan Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan Santoso.
- d) Tahun 2012 terungkap adanya jaringan teroris untuk mengumpulkan dana lewat internet, untuk pembelian senjata, *explosive*/bahan peledak dan pelatihan.

- e) Telah terungkap adanya aksi teror dengan menargetkan Pemilihan Kepala Daerah, seperti :
 - (1) Pelemparan bom kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
 - (2) Teror menjelang Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2011.
- f) Pada tahun 2013 - 2014 merupakan tahun politik. Proses Pemilu Presiden dan DPR termasuk Pemilihan Kepala daerah, kemungkinan jadi target teroris.
- g) Laporan Intelijen terpadu: Daftar Pencarian Orang (DPO) teroris masih aktif dan terus merekrut militan baru.
- h) Tokoh-tokoh ideologis masih terus menyerukan jihad sambil menamakan kebencian dan menyebarkan permusuhan.
- i) Bagi teroris, musuh utama adalah Polri dan menyerang Polri khususnya Densus dan BNPT sambil berusaha mengadu domba TNI dengan Polri.
- j) Perkembangan Lingkungan Internasional, khususnya *Arab Spring* akan berpengaruh pada situasi di Indonesia.

b. Fakta

1) Potensi Aksi Gerakan Radikalisme

Gerakan radikalisme dan konflik sosial diprediksi masih akan terus terjadi pada tahun-tahun mendatang. Radikalisme yang terkait dengan konflik-konflik sosial bersumber dari deprivasi ekonomi, yaitu perasaan terpinggirkan secara ekonomi, karena adanya perasaan kalangan masyarakat yang teralienasi, perasaan terasing hidup di lingkungan sendiri, adanya perasaan terancam dari kelompok

masyarakat. Kelompok radikal, berpotensi besar melakukan infiltrasi terhadap konflik-konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Isu-isu marginalisasi, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, tetap menjadi fokus kampanye kelompok radikal. Selain itu, pertentangan kelas juga menjadi isu yang sangat mudah dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menyulut kekerasan. Misalnya, buruh dengan pengusaha atau petani dengan pengusaha agrobisnis atau perkebunan.

2) Kebijakan Penanggulangan Radikalisme

Selama ini, usaha memberantas aksi-aksi radikal di Indonesia bisa dibilang kurang maksimal. Meskipun sudah dibuat undang-undang khusus terorisme, namun hal itu belum bisa membuat para teroris jera. Terbukti dari sekian banyak pelaku terorisme yang ditembak mati, mayoritas mereka pernah dipenjara sebelumnya. Kegagalan ini mengindikasikan bila memberantas terorisme tak cukup hanya dengan penjara semata. Perlu dilakukan langkah-langkah lain utamanya yang bersinggungan langsung dengan pemahaman (ideologi). Langkah ini sangat penting untuk membersihkan pemahaman eksklusif yang selama ini bersarang di otak mereka. Karena sudah menjadi ideologi, menghilangkannya pun harus menggunakan ideologi (kontra-ideologi). Kontra-Ideologi di sini berarti mencoba mempertemukan pemahaman mereka yang sempit dengan pemahaman terbuka yang kita anut di Indonesia. Memang bukan perkara mudah, tapi bagaimanapun, terorisme tak bisa dibiarkan. Apalagi bila hal itu telah menyeret ajaran agama tertentu di dalamnya.



3) Keberadaan Lembaga dalam Penanggulangan Radikalisme.

Lemahnya koordinasi dan sinergitas mengakibatkan masing-masing pihak beranggapan bahwa fungsi, tugas dan tanggung jawab yang diemban hanya berkisar pelaksanaan Tupoksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan kurang memerhatikan keterkaitan tugas maupun pengaruh dan dampak dari penjabaran kebijakan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi, terutama keterkaitan permasalahan pada bidang Ipoleksosbudhankam. Kondisi ini berakibat pada rendahnya upaya *preemptif* dan *preventif* masing-masing dalam menanggulangi gerakan radikal di berbagai wilayah.

4. Analisa dan Upaya

Untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan penanggulangan radikalisme, maka perlu analisis secara komprehensif dari sudut pandang pancagatra untuk menentukan langkah strategis pemecahan permasalahannya.

a. Analisis Strategik

1) Aspek Ideologi

Kelompok radikal sampai saat ini masih berusaha untuk menggantikan Pancasila dan UUD 1945 dengan pemahaman ajaran yang diyakininya. Lebih jauh lagi, dampak negatifnya juga bisa menurunkan rasa nasionalisme. Efek ini bisa dibuktikan dengan begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Mereka berubah menjadi siap untuk melakukan aksi teror guna menghancurkan bangsanya sendiri. Fakta ini mengindikasikan

bahwa rasa nasionalisme yang ada pada diri mereka masih sangat rendah terhadap negara ini. Efek berantainya bisa berakibat pada terganggunya keyakinan masyarakat terhadap kedaulatan bangsa dan ketangguhan ideologinya.

2) Aspek Politik

Kelangsungan politik memiliki keterkaitan yang erat dengan kelangsungan proses pemerintahan. Untuk menjalankan proses pemerintahan, segala komponen yang terlibat dalam pemerintahan harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mencapai tujuan nasional. Situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan radikalisme dan kekuatan pemerintah akan menguras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri akan dapat menganggap bahwa Indonesia adalah merupakan sarang radikalisme dan teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara mengeluarkan *travel warning* kepada warganya yang akan berkunjung ke Indonesia maupun pengawasan ketat terhadap warga negara Indonesia yang akan keluar negeri.

3) Aspek Ekonomi

Setiap terjadi aksi-aksi radikal di dalam negeri, mengakibatkan para investor ragu-ragu dan para pembeli luar negeri bimbang membuka order dengan Indonesia. Upaya normalisasi keadaan ini akan memakan waktu yang relatif lama dan kepercayaan akan kembali secara bertahap, setelah kita dapat menunjukkan langkah-langkah dan hasil-hasil konkret di bidang keamanan, reformasi hukum, fiskal dan moneter, serta langkah-langkah lainnya

yang memperbaiki iklim usaha. Dampak ekonomi sektor pariwisata, Indonesia kehilangan pemasukan devisa yang tinggi, hal ini terbukti saat kejadian Bom Bali I dan II, semua turis berbondong-bondong meninggalkan Indonesia yang mengakibatkan sektor pariwisata menjadi lesu. Sedangkan dari segi ekonomi, pariwisata telah menyumbang kemakmuran bagi rakyat, karena di bidang ini telah mempekerjakan sejumlah orang di bidang perhotelan, kuliner, pertokoan dan selainnya.

4) Aspek Sosial Budaya

Dampak radikalisme di bidang sosial-budaya akan menimbulkan konflik komunal yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang berada dalam sistem sosial budaya Indonesia. Konflik tersebut memunculkan disintegrasi terhadap nilai fundamental bangsa Indonesia. Karena sebagian besar aksi-aksi teror yang muncul menginginkan adanya pembentukan sebuah negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal inilah yang bisa menyebabkan konflik horizontal dalam masyarakat. Karena pada dasarnya negara Indonesia mempunyai masyarakat yang heterogen yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Apabila ada dari salah satu komponen tersebut memaksakan kehendaknya maka akan dapat menimbulkan konflik.

5) Aspek Pertahanan dan Keamanan

Dari segi pertahanan keamanan, masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal. Setiap orang curiga kepada orang lain terkait dengan aksi radikal. Hal ini akan berimplikasi

pada persoalan di dalam masyarakat. Hadirnya aksi-aksi radikal secara jelas telah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga negara Indonesia secara keseluruhan. Sebagai konstituen dalam kehidupan bernegara, ancaman terhadap warga negara juga berarti ancaman terhadap keamanan nasional secara keseluruhan.

b. Upaya

Radikalisme muncul karena dipicu oleh rasa frustrasi masyarakat akibat kondisi keterpurukan ekonomi, hiruk-pikuk politik, perubahan cepat sosial-budaya serta agama dan tokoh religi yang lamban bahkan tidak mampu menyuguhkan solusi. Sebagai konsekuensi, masyarakat yang merasa kehilangan harapan ke depan mencoba berkreasi mencari jalan pemecahan sendiri, maka munculah gagasan dan paham-paham penyelamatan lainnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, peran serta pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi paham-paham radikalisme dan gerakannya melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat dalam implementasi ketahanan bangsa, khususnya dalam pembinaan karakter dan jati diri bangsa.
- 2) Meningkatkan program pembangunan kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan program pemantapan wawasan kebangsaan terhadap komponen masyarakat guna memperkokoh ketahanan nasional.
- 4) Mengintensifkan Program Deradikalisasi.

- 5) Pembinaan Regulasi Keamanan.
- 6) Reformasi Sektor Keamanan.
- 7) Reorientasi Pendidikan.
- 8) Kampanye Sosial dan Kultural Secara Massif.
- 9) Sinergi Tupoksi antar Forum.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Radikalisme merupakan paham yang menghendaki perubahan, pergantian dan pengebolan terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya dan menggunakan cara-cara kekerasan.
- b. Gerakan radikalisme yang disertai dengan tindakan anarkis sangat berpengaruh terhadap kondisi stabilitas politik yang kondusif dan dinamis.
- c. Indonesia yang memiliki keberagaman etnik dan suku bangsa dengan beragam pemikiran, keinginan dan kesenjangan perekonomian, bahkan dengan mayoritas masyarakatnya yang masih berada pada tingkat perekonomian menengah ke bawah sangat mudah dan rentan dimasuki berbagai paham, khususnya paham radikal.
- d. Dinamika globalisasi di bidang teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu pesat semakin membuka peluang bagi tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme khususnya pada generasi muda.

6. Rekomendasi

Dalam rangka mendukung terwujudnya penanggulangan radikalisme guna mewujudkan sistem keamanan nasional

dalam rangka ketahanan nasional, maka disarankan perlu melakukan langkah-langkah yang lebih komprehensif dan nyata, antara lain:

- a. Aspek Ideologi. Para tokoh agama dengan dipelopori Menteri Agama membuat sebuah komitmen dan pemahaman yang sama tentang ideologi radikal keagamaan, sehingga masyarakat tidak ada keraguan dalam melaksanakan ibadahnya dan kelompok radikal ideologi keagamaan terisolasi dalam lingkungannya dan memudahkan proses deradikalisasi.
- b. Aspek Politik. Membangun kembali kesadaran para pemimpin ataupun para pemikir bangsa untuk dapat menjadi “jembatan” yang mampu meneruskan berbagai kepentingan bangsa yang sangat plural dan majemuk dengan mendasarkan pada berbagai tindakan dan kebijakan yang selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Aspek Ekonomi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menciptakan (a) regulasi yang kondusif untuk tumbuhnya lapangan kerja disektor formal dan informal; (b) sistem permodalan yang kondusif untuk tumbuhnya usaha kreatif skala mikro dan skala kecil; (c) program pendampingan pengelolaan intensif bagi usaha skala mikro dan skala kecil.
- d. Aspek Sosial Budaya. Pendidikan formal harus dilakukan pemerintah dengan memberikan muatan materi pengetahuan pada kurikulum pendidikan meliputi mata pelajaran Kewarganegaraan, Kewiraan, Tata

Krama dan Budi Pekerti sesuai dengan tingkat pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan Universitas.

- e. Aspek Pertahanan dan Keamanan. TNI dan Polri sebagai elemen utama dalam upaya penanggulangan radikalisme untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah terkait, baik di pusat dan daerah atau dengan swasta serta elemen sipil lainnya karena dukungan dan koordinasi dalam mendeteksi dan mengatasi paham radikal serta gerakannya akan mudah diatasi. Untuk itu, perlu regulasi yang jelas guna menghindari keraguan dalam bertindak dan opini-opini yang tidak mendukung, sehingga aparat berani mengambil keputusan dalam bertindak.

Catatan Kaki

1. Meningkatkan penanggulangan radikalisme guna mewujudkan sistem keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional, Materi Dirjen Kesbangpol pada *Focus Group Discussion* (FGD) di Lemhannas, 14 Mei 2014
2. *Ibid*
3. Meningkatkan penanggulangan radikalisme guna mewujudkan sistem keamanan nasional dalam rangka ketahanan nasional, Irjen Pol. Drs. Bambang Suparno, SH., M.Hum, RTD di Lemhannas, 12 Agustus 2014

Tim Kajian "Meningkatkan Penanggulangan Radikalisme guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional"

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Irjen Pol Boy Salamuddin | 7. Yustinus Susanto, S, SH |
| 2. Mayjen TNI Hari Mulyono, SE, MM | 8. Kolonel Adm Drs. Warnoto |
| 3. Irjen Pol Drs. Johnny Mangasi Samosir | 9. Kolonel Inf Azhar Tanjung |
| 4. Brigjen TNI Sakkan Tampubolon | 10. Mayor Ckm Elysmi Haryati |
| 5. Tony Tribagus Spontana, SH, MH | 11. Atam |
| 6. Dr. Herdis Herdiansyah, M. Hum | 12. Dewi Sartika Sigar |